

# **KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP SENGKETA DI LAUT CHINA SELATAN ERA KEPEMIMPINAN OBAMA**

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: [hana.viansy.2014@fisipol.umy.ac.id](mailto:hana.viansy.2014@fisipol.umy.ac.id)

## **ABSTRAK**

Konflik Laut China Selatan merupakan isu sengketa yang telah berlangsung sejak lama namun masih menjadi isu yang terus diperdebatkan. Perbedaan klaim mengakibatkan munculnya insiden yang berdampak pada stabilitas keamanan kawasan, sehingga berpengaruh pada aspek kepentingan lain. Upaya penyelesaian konflik diarahkan pada perundingan damai dan kerjasama dimana telah melibatkan banyak pihak di dalamnya termasuk Amerika Serikat.

Jurnal ini akan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan dengan kerangka pemikiran yang digunakan berupa diplomasi politik dan keamanan.

**Kata kunci:** Amerika Serikat, Laut China Selatan, diplomasi, sengketa.

## **ABSTRACT**

*The South China Sea conflict is a dispute issue that has been going on for a long time but is still an issue that continues to be debated. Differences in claims result in incidents that have an impact on regional security stability, thus influencing other aspects of interest. The conflict resolution efforts are directed at peace negotiations and cooperation which have involved many parties including the United States.*

*This journal will analyze how the efforts made by the United States in resolving conflicts in the South China Sea with the framework used in the form of political and security diplomacy.*

**Keywords:** *United States, South China Sea, diplomacy, dispute.*

## Pendahuluan

Amerika Serikat merupakan negara pemenang perang yang kemudian menjadi satu-satunya negara dengan kekuatan unggul pasca Perang Dunia ke 2 berakhir. Terlebih setelah terjadi kemunduran pesat terhadap Uni Soviet yang semakin mendukung pergerakan Amerika Serikat sebagai pihak pendorong dan secara terus menerus berkembang serta melebarkan pengaruhnya di setiap belahan dunia. Hal ini juga yang mendasari munculnya deklarasi kepada dunia oleh Amerika Serikat yang menyebut dirinya sebagai 'polisi dunia'. Kondisi ini terjadi mengingat pada masa itu Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan yang besar dan jaringan militer yang kuat sehingga mampu mempertahankan stabilitas kawasannya pasca perang. Ini justru berbanding terbalik dengan beberapa negara yang mengalami fase keterpurukan akibat perang yang tidak hanya berpengaruh pada stabilitas kawasan namun juga pada aspek kehidupan lainnya.

Kemudian dengan peran dirinya sebagai 'polisi dunia' inilah, Amerika Serikat mulai melibatkan diri dalam isu konflik yang terjadi sebagai pihak penengah dan menawarkan penyelesaian konflik disana. Walau tidak semua konflik dimana Amerika Serikat terlibat mampu diselesaikan dengan perundingan damai, nyatanya ada banyak isu dimana Amerika Serikat kemudian sempat melibatkan diri sebagai pihak penengah yang berupaya menyelesaikan konflik, Laut China Selatan merupakan salah satu diantaranya. Didukung dengan adanya rancangan kebijakan Amerika Serikat oleh presiden Obama yang kala itu memutuskan untuk memfokuskan kebijakan luar negeri pada penguatan eksistensinya di kawasan Asia, Amerika Serikat berupaya mempererat kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut lewat aspek-aspek seperti; politik, militer, dan ekonomi.

Sengketa Laut China Selatan sendiri merupakan konflik lama yang telah melibatkan negara-negara disekelilingnya. Didasari oleh berbagai alasan klaim beberapa negara berdatangan, mulai dari China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam terhadap perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi ini. Adalah kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel yang terletak di tengah kawasan Laut China Selatan sebagai pusat dari sengketa yang terjadi. Dua pulau ini merupakan pulau dengan gugusan karang yang besar secara keseluruhan, lalu membentuk beberapa pulau yang tidak terlalu besar dan terpisah-pisah serta mengandung SDA (Sumber Daya Alam) yang begitu kaya di dalamnya.

Menurut data yang dilaporkan oleh USGS (*U.S. Geological Survey*) dimana setidaknya terdapat 4,8 miliar barrel minyak dan 64 miliar kubik gas alam di bawah laut wilayah ini (Hargreaves, 2012). Deposit minyak lainnya juga telah ditemukan dalam beberapa kontinental yang mengelilingi Laut China Selatan. Kawasan ini diperkirakan mampu menampung cadangan minyak yang mana tujuh miliar barel dan kapasitas produksi 2,5 juta barel per hari (EIA, US, 2003). Selain itu kawasan ini juga menjadi jalur perjalanan utama bagi perdagangan minyak dunia. Dimana pelayaran yang utamanya mengangkut bahan mentah dan sumber daya energi; minyak mentah, LNG (*liquefied natural gas*), batubara, dan biji besi, akan menempuh perjalanan menuju negara-negara Asia Timur (Rowan, 2005, p. 416). Bahkan diperkirakan setidaknya hampir 94 ribu kapal dari 100 tonase kotor melewati

Selat Malaka pada tahun 2004 dari 607 ribu perjalanan kapal global, atau 15 persen dari total perjalanan laut kapal dunia yang kemudian melalui kawasan ini. Dari jumlah tersebut, 32 persen adalah kapal kontainer, 25 persen adalah kapal tanker, 15 persen adalah kapal kargo, dan 15 persen adalah kapal curah, dengan sisa LNG dan kapal lainnya (EIA, U.S., 2013).

Potensi-potensi yang memiliki nilai keuntungan besar ini kemudian menjadi iming-iming bagi negara-negara yang mengelilingi kawasan sengketa untuk memberikan hak kepemilikannya atas kawasan. Ini jelas dikarenakan adanya bayangan jumlah keuntungan jangka panjang pula jika suatu negara kemudian mampu memberikan klaimnya atas kawasan ini. Sehingga sejumlah klaim dideklarasikan dengan berbagai dasar alasan kepemilikan.

Brunei Darussalam, China, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam merupakan negara-negara yang memberikan klaimnya atas kawasan Laut China Selatan. Namun, dari keenam negara yang menajutkan klaim atas kawasan ini memiliki asas yang berbeda-beda, sehingga hal ini berdampak pada hasil putusan akan hak kepemilikan karena memerlukan proses panjang. Ada beberapa asas klaim yang dijadikan acuan bagi para negara pengklaim kawasan di Laut China Selatan, diantaranya adalah; menggunakan peta sejarah dinasti maupun peta peninggalan penjajah oleh China, Taiwan, Filipina, dan Vietnam, serta aturan UNCLOS oleh Brunei Darussalam dan Malaysia.

Dikarenakan adanya perbedaan asas klaim, negara-negara yang memberikan klaimnya terhadap Laut China Selatan kemudian memberikan penolakan terhadap masing-masing. Hal ini juga kemudian berdampak pada beberapa kegiatan setiap negara pengklaim yang berusaha memberikan tindakan terhadap wilayah klaimnya. Beberapa negara mulai menunjukkan bentuk peringatan dengan menempatkan pasukan disekitar area perbatasan atau bahkan mulai menempati pulau-pulau klaimnya. Tindakan ini berujung dengan munculnya insiden-insiden yang secara tidak langsung juga berdampak pada kondisi kawasan.

Ketegangan antara pihak-pihak pengklaim mulai naik dan menjadi perhatian publik. Seperti yang terjadi pada November 2012 lalu dimana China merilis gambar peta pada *passport* barunya dengan menyertakan daratan Taiwan serta kawasan sengketa di dalamnya. Peta versi terbaru ini secara otomatis mendapat penolakan keras dari negara-negara yang juga bersengketa dikawasan Laut China Selatan, yakni Filipina dan Vietnam. Keduanya merasa bahwa apa yang dilakukan China terhadap peta tersebut adalah salah satu dari bentuk 'pemaksaan' yang dilakukan agar mendapatkan pengakuan terhadap kepemilikan kawasan serta termasuk dalam pelanggaran kedaulatan. Garis titik-titik dalam peta bahkan bisa memberikan efek yang besar pada kegiatan dikawasan, seperti jarak navigasi serta ilegalitas pelayaran dikawasan serta termasuk dalam pelanggaran kedaulatan. Situasi ini menyebabkan kondisi kawasan dilapangan sempat memanas.

Selain itu, munculnya kegiatan pembangunan disekitar kawasan sengketa yang dilakukan diantaranya oleh beberapa negara terlibat ikut mengundang perseteruan lain. China merupakan salah satu dari negara yang membangun pulau buatan dikawasan sengketa, tepatnya disekitar kepulauan Sparty. Dengan dalih pada tujuan pembangunan yang akan diperuntukkan bagi sipil dan penyediaan fasilitas terhadap kapal yang melintas, China

menolak tuduhan atas tujuan pembangunan pulau buatan tersebut ialah diperuntukan bagi kegiatan militerisasi. Meski pada kenyataannya, China melayangkan protes keras terhadap tindakan pesawat tempur milik Amerika Serikat yang melintas diatas pulau buatanya dan menuding hal tersebut sebagai tindakan mata-mata.

Dari insiden-insiden yang terjadi di Laut China Selatan inilah kemudian Amerika Serikat merasa bahwa penyelesaian secara damai terhadap konflik sengketa yang terjadi perlu dilakukan demi menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan. Terlebih atas tindakan China yang mencantumkan peta kawasan sengketa pada passport serta pembangunan pulau buatan dikawasan yang turut memperlihatkan betapa negeri tirai bambu itu memiliki dominasi pun ambisi yang kuat dikawasan Laut China Selatan saat ini.

Kedepannya ini tentu akan memberikan dampak luas terhadap kawasan dan negara-negara sekelilingnya, termasuk pada Amerika Serikat yang secara tidak langsung juga memiliki kepentingan dikawasan sengketa. Penggunaan jalur navigasi dan lintas patroli laut adalah sebagian kecil dari permasalahan yang akan dihadapi Amerika Serikat apabila sengketa ini terus berlanjut atau setidaknya mengalami insiden-insiden lainnya. Selain itu keberadaan aliansinya dalam sengketa memperkuat kepentingan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik. Terhubung dengan aliansi bersama Filipina, Amerika Serikat jelas memiliki tujuan yang sama untuk hasil sengketa ini. Terlebih dengan dominasi China yang semakin naik kepermukaan kian mempengaruhi Amerika Serikat untuk menjadi pengimbang agar setidaknya meminimalisir dampak terburuk seperti kontak senjata.

## **Kerangka pemikiran**

Dalam kajiannya, politik luar negeri menurut Gibson merupakan komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Politik luar negeri ditujukan kepada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa (Roy, 1995, p. 31). Dasar dari rancangan politik luar negeri ini ialah kepentingan nasional yang menjadi kendaraannya. Sementara jalan menuju pencapaian tersebut akan dilakukan lewat sebuah diplomasi.

Dalam proses perwujudannya inilah kemudian politik luar negeri memiliki kaitan yang erat dengan diplomasi. Politik luar negeri merupakan indukan dari konsep yang menghasilkan diplomasi sebagai operasional dari rancangannya. Dalam buku yang berjudul Diplomasi oleh S.L Roy memuat bahwa menurut J.R. Childs;

*“Politik luar negeri suatu negara adalah substansi hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi adalah proses dimana kebijakan itu dilaksanakan.”*

Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan antara politik luar negeri dan diplomasi dalam pendefinisian J.R. Childs ini layaknya substansi dan metode (Roy, 1995, p. 33). Selain itu, dari sumber yang sama Harlord Nicholson yang merupakan seorang penulis tentang diplomasi dalam penelitiannya juga menuliskan tentang keterkaitan dua hal ini. Menurut Nicholson;

*“Politik luar negeri didasarkan atas konsepsi umum kebutuhan nasional. Sebaliknya diplomasi merupakan sebuah alat atau metode. Diplomasi berusaha, dengan menggunakan akal, perdamaian dan pertukaran kepentingan, untuk mencegah konflik besar diantara negara-negara. Diplomasi merupakan lembaga, melalui politik luar negeri yang berusaha mencapai tujuannya lewat persetujuan, ketimbang perang.”* (Roy, 1995, p. 34).

Ada beberapa bagian dari ruang lingkup yang menjadi pokok pembahasan diplomasi. Isu-isu diplomasi yang terus berkembang memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi ruang lingkup diplomasi yang tidak lagi sekedar berkecimpung dalam ranah politik, ekonomi, dan militer saja. Namun terus merambat pada ruang lingkup yang lebih luas meliputi; HAM, kebudayaan, lingkungan, keamanan, dan sebagainya.

S.L. Roy dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy* menuliskan, diplomasi politik sendiri mengacu kepada tujuan mempererat hubungan antara negara sekutu, memelihara hubungan dengan negara-negara sehaluan dan menetralsir negara yang memusuhi, serta membina atau bahkan mengumpulkan persahabatan baru melalui negosiasi yang bermanfaat karena tujuan akan lebih mudah dicapai bersama pihak yang memiliki kesamaan kepentingan didalamnya (Roy, 1995, p. 6). Diplomasi ini biasanya ditandai dengan adanya kerjasama bilateral antara kedua negara yang bersangkutan, ataupun kerjasama multilateral dengan penggabungan kemitraan dalam golongan atau organisasi tertentu.

Adapun diplomasi keamanan mengacu pada upaya dalam membangun program kemitraan melalui penggunaan program terkait keamanan, dan tidak menggunakan ancaman kekuatan terhadap mitra kerjasama. Diplomasi keamanan juga merupakan mekanisme untuk mengumpulkan dan memantau negara-negara sekutu dalam sebuah pendekatan diplomatik<sup>1</sup>. Selain itu diplomasi ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan melindungi setiap bagian dari negaranya. Umumnya diplomasi keamanan akan berlangsung dalam berbagai bentuk kerjasama dibidang keamanan misalnya; revitalisasi kerjasama militer, keamanan teritorial, isu keamanan maritime, serta beberapa kegiatan militer, seperti agenda latihan pasukan dan lain sebagainya.

## **Dinamika konflik di Laut China Selatan**

Terdapat setidaknya enam klaim dijatuhkan terhadap kawasan Laut China Selatan dan keenam klaim ini pula terbagi menjadi beberapa bagian dimana asas klaim yang diajukan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. China, Taiwan, Filipina, dan Vietnam, telah mengajukan klaimnya terhadap kawasan dengan dasar peta sejarah dinasti maupun peta peninggalan penjajah, sedangkan Malaysia dan Brunei Darussalam mengajukan klaim mereka berdasarkan pada peraturan UNCLOS 1982. Berikut adalah rangkuman singkat dasar klaim dari negara-negara pengklaim kawasan Laut China Selatan;

---

<sup>1</sup> D. Kron, Nicholas. 2015. “Security Diplomacy: Beyond Defense”. Tesis. John Hopkins University for the degree of Master of Arts in Global Security Studies, hal. 29

## 1. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam pada dasarnya tidak menjatuhkan klaim terhadap kepulauan Spratly maupun ikut menempatkan pasukan pada pulau-pulau di kawasan Laut China Selatan. Meski begitu, Brunei sendiri telah mengklaim dua wilayah terpisah yaitu, Louisa Reef dan Riflun Bank. Ini dikarenakan jika mampu menduduki Louisa Reef —yang juga diklaim oleh Malaysia— hal itu akan memungkinkan bagi para petinggi Brunei untuk kemudian dapat memperluas ZEE Brunei Darussalam.

Klaim Brunei terhadap Riflank Bank didasarkan pada keputusan tahun 1954 oleh Inggris yang menyatakan batas-batas pulau Kalimantan, di mana Brunei berada, untuk termasuk, “Area dari landas kontinen. . . ke perairan teritorial” (Mark J. Valencia, 1997). Peta yang terbaru yang diterbitkan oleh Brunei pada tahun 1988 telah memuat perpanjangan landas kontinennya menjadi 350 mil laut, yang selanjutnya kian memperkuat klaim teritorialnya terhadap Riflanc Bank (Rowan, 2005, p. 420).

## 2. China

Beijing mendasarkan klaimnya di kawasan Laut China Selatan berdasarkan atas apa yang tertera dalam data historis China sendiri (Deen, 1999). Pada tahun 110, Dinasti Han memulai ekspedisi angkatan laut ke wilayah sekitar Kepulauan Spratly. Ekspedisi lain dikirim oleh Dinasti Ming pada 1403–33. Dari abad ke-12 hingga abad ke-17, catatan sejarah China membuat referensi berkala terhadap Kepulauan Spratly, termasuk diskusi tentang ketinggian mereka di atas permukaan laut. Namun, karena adanya tradisi konfusianisme, sehingga sulit dibuktikan seberapa banyak klaim China di kawasan Laut China Selatan (Mark J. Valencia, 1997, p. 20).

Pemerintah China kemudian kembali menegaskan klaim atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada abad ke-19 dan ke-20. Klaim kedaulatan resmi pertama dibuat pada 1876 ketika duta besar China untuk Inggris yang mana mengklaim Kepulauan Paracel sebagai wilayah China. Ini diikuti pada tahun 1883 oleh pengusiran tim survei Jerman dari Spratlys. Namun, pada 1930-an China kehilangan bagian dari pulau-pulau (Rowan, 2005, p. 427).

Dua tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, Beijing merilis peta yang menampilkan garis sembilan garis putus-putus, yang mana memuat kawasan Laut China Selatan di dalamnya, garis putus-putus ini membentuk "tongue-like configuration" atau menyerupai huruf U yang mencakup sebagian besar kawasan tersebut, dan pada bulan Mei 1996, Beijing kembali menerbitkan daftar garis pangkal yang menghubungkan Kepulauan Paracel tetapi tidak menyebutkan Kepulauan Spratly (Mark J. Valencia, 1997, pp. 24-25), namun tidak ada klarifikasi lebih lanjut dari garis peta yang telah ditawarkan.

Pada 25 Februari 1992, Beijing kembali mengesahkan Undang-Undang tentang Wilayah Perairan dan Wilayah Berdekatannya, ini dikenal juga sebagai Hukum Laut Teritorial, yang mana menurut Pasal 2, Kepulauan Nansha (Spratly)

secara resmi adalah bagian dari wilayah China. Selain itu, undang-undang menetapkan, “Luas wilayah perairan China mengukur 12 mil laut dari garis dasar laut teritorial. . . . Laut teritorial China mengacu pada perairan yang berdekatan dengan tanah teritorial. Tanah teritorial China meliputi daratan dan pulau-pulau lepas pantai, Taiwan dan berbagai pulau-pulau terafiliasi termasuk Pulau Diaoyu, Pulau Penghu, Pulau Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Nansha (Spratly) dan pulau-pulau lain milik Republik Rakyat Tiongkok.” (UN, 1992).

### **3. Filipina**

Filipina mengklaim delapan pulau dari rantai Pulau Spratly; Nanshan, Flat, West York, Cay Northeast, Thitu, Lankiam Cay, Loaita, dan Commodore Reef, namun tidak bagi daratan utama itu sendiri. Secara umum, klaim Manila didasarkan pada empat argumen, yakni; pulau-pulau itu berdekatan atau bersebelahan dengan pulau-pulau utama Filipina; wilayah ini secara ekonomi dan strategis penting bagi Filipina; pulau-pulau itu ditinggalkan setelah Perang Dunia II; dan pendudukan Filipina baru-baru ini dari beberapa pulau memberikannya judul baik melalui "penemuan" atau "akuisisi preskriptif" (Mark J. Valencia, 1997, p. 33). Klaim ini juga diperkuat dengan deklarasi Cloma sebagai pelindung atas pulau-pulau itu dan menamai mereka Kalaya'an (Freedomland) mengingat pengusaha Filipina ini merupakan seorang yang telah menduduki pulau tersebut dan menyebutkan sempat mendirikan pemukiman pula disana. Cloma kemudian menyerahkan Kepulauan Kalaya ke Filipina pada tahun 1974. Pada tahun 1971 dan 1978, Presiden Ferdinand Marcos secara resmi mengumumkan Kepulauan Kalaya untuk menjadi bagian dari Filipina. Manila menegaskan kembali klaimnya sebelum menandatangani UNCLOS pada tahun 1982 (Rowan, 2005, p. 421).

### **4. Malaysia**

Secara total, Malaysia mengklaim 12 pulau di Laut China Selatan. Enam dari ini — Ardasier Reef, Dallas Reef, Louisa Reef, Mariveles Reef, Royal Charlotte Reef, dan Swallow Reef — secara fisik diduduki oleh pasukan Malaysia. Pemerintah Malaysia juga telah menggunakan tanah dari daratan untuk menaikkan level Swallow Reef, membangun hotel, landasan udara, dan chalet untuk penyelam scuba di terumbu karang. Tiga karang — Erica, Investigator, dan Luconia — juga diklaim oleh Malaysia tetapi tidak dihuni. Commodore Reef diklaim oleh Filipina dan Malaysia, sedangkan Amboyna Cay dan Braque Canada Reefs secara bersama-sama diklaim oleh Malaysia dan Vietnam (Rowan, 2005, p. 420). Malaysia secara konsisten menggunakan teori landas kontinen, yang digariskan dalam UNCLOS dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Kontinental Shelf 1966 dari Malaysia, untuk membenarkan klaimnya di wilayah tersebut. Namun, peneliti Valencia, Van Dyke, dan Ludwig berpendapat bahwa klaim Kuala Lumpur meragukan (Mark J. Valencia, 1997, p. 37).

### **5. Taiwan**

Taiwan mengklaim kedaulatan atas beberapa kelompok pulau Laut China Selatan termasuk Spratly (Nansha), Paracels (Hsisha), Kepulauan Macclesfield

(Chungsha), dan Pratas (Tungsha) dan merupakan negara penuntut pertama yang menduduki sebuah pulau di dalam rantai Spratly. Meskipun kepulauan Spratly adalah 800 mil laut dari Taiwan dan secara efektif melampaui jangkauan proyeksi kekuatan Taiwan, pemerintah di Taipei telah memberikan prioritas tinggi ke pulau-pulau itu. Pada tahun 1990, Eksekutif Yuan (kabinet) menempatkan Pratas dan Taiping Islands di bawah yurisdiksi sementara pemerintah kotamadya Kaohsiung, kota paling selatan Taiwan. Pada bulan Oktober 1992, Taipei menetapkan zona laut terluar seluas 4.000 meter di sekitar Pratas dan Taiping. Laporan Pertahanan Nasional, Republik China, 1993-1994 termasuk bagian khusus di Laut China Selatan (Report, 1994, pp. 31-48).

## **6. Vietnam**

Vietnam mengklaim seluruh jaringan Pulau Spratly sebagai distrik lepas pantai Provinsi Khanh Hoa. Selain itu, Vietnam terus mengklaim Kepulauan Paracel, meskipun mereka disita oleh China pada tahun 1976. Hanoi mempertahankan garnisun di sekitar 22 fitur geografis di Laut China Selatan, termasuk lokasi di Pulau Spratly, Karang London Barat, Amboyna Cay, Pearson Reef, Sin Pulau Crowe, Pulau Namyit, Sand Cay, Barque Canada Reef, dan Southwest Cay. Pada tahun 1988, Vietnam memiliki sekitar 350 pasukan yang ditempatkan di pulau-pulau ini dan pada tahun 1992 jumlahnya telah meningkat menjadi 1.000. Garnisun utama di Pulau Sin Crowe sangat dipalsukan dengan artileri pantai dan baterai anti-pesawat (Mark J. Valencia, 1997, p. 31).

Vietnam mengklaim seluruh jaringan Pulau Spratly sebagai distrik lepas pantai Provinsi Khanh Hoa. Selain itu, Vietnam terus mengklaim Kepulauan Paracel, meskipun mereka disita oleh China pada tahun 1976. Hanoi mempertahankan garnisun di sekitar 22 fitur geografis di Laut China Selatan, termasuk lokasi di Pulau Spratly, Karang London Barat, Amboyna Cay, Pearson Reef, Sin Pulau Crowe, Pulau Namyit, Sand Cay, Barque Canada Reef, dan Southwest Cay. Pada tahun 1988, Vietnam memiliki sekitar 350 pasukan yang ditempatkan di pulau-pulau ini dan pada tahun 1992 jumlahnya telah meningkat menjadi 1.000. Garnisun utama di Pulau Sin Crowe sangat dipalsukan dengan artileri pantai dan baterai anti-pesawat (Mark J. Valencia, 1997, p. 31).

Berkat perbedaan-perbedaan dasar klaim inilah kemudian beberapa insiden mulai bermunculan disekitar kawasan sengketa dikarenakan adanya sikap saling tolak-menolak dalam mengakui kebenaran kalim masing-masing. Dalam rentan waktu dimana konflik di Laut China Selatan berjalan telah banyak insiden yang pernah terjadi. Meski insiden-insiden yang terjadi diantaranya merupakan beberapa insiden yang juga pernah terjadi sebelumnya, bentuk penyelesaian konflik ini masih terus berjalan dengan intensitas dan jenis kejadian yang beragam. Problematika inilah yang kemudian menyebabkan sengketa di Laut China Selatan kerap kali berakhir dengan ketidak stabilan kawasan dalam senggang waktu tertentu karena memanasnya kondisi kawasan oleh insiden yang terjadi.

Dalam beberapa insiden yang pernah terjadi, adanya tindakan saling menghadang kapal patroli dan kapal nelayan merupakan jenis insiden yang terhitung hampir selalu terjadi



pada setiap negara pengklaim. Ini dikarenakan hampir setiap negara pengklaim telah menempatkan pasukan militer mereka di area dekat perbatasan klaim dan menjadi sebuah kegiatan yang wajar ketika melakukan patroli. Selain itu pengetahuan nelayan yang tidak sepenuhnya memahami garis persis perbatasan laut atau memang mengamini klaim negaranya, menjadi sebab mengapa insiden ini kerap kali terjadi.

Seiring berjalannya waktu masalah-masalah baru kemudian terus bermunculan dengan adanya tuduhan-tuduhan dari setiap negara pengklaim terhadap lawannya. China dikenal sebagai negara yang menjadi sorotan dalam hal ini. Pasalnya, pada 2012, tindakan China yang mendeklarasikan haknya atas kawasan Laut China Selatan lewat perilisan garis putus-putus yang menyerupai huruf U dan mencakup sebagian besar kawasan tersebut telah mengundang penolakan keras dari banyak kalangan. Vietnam dan Filipina dalam hal ini merasa bahwa tindakan yang dilakukan China merupakan bentuk 'pemaksaan' secara tidak langsung terhadap status klaim China di kawasan sengketa. Terlebih lagi dengan status kepemilikan kawasan yang masih belum jelas, sehingga bentuk klaim semacam ini akan sangat berdampak pada segala bentuk kegiatan yang ada di kawasan Laut China Selatan dan berkemungkinan menimbulkan insiden yang lebih besar lagi. Selain itu, munculnya kegiatan pembangunan disekitar kawasan sengketa yang dilakukan diantaranya oleh beberapa negara terlibat ikut mengundang persteruan lain. China merupakan salah satu dari negara yang membangun pulau buatan dikawasan sengketa, tepatnya disekitar kepulauan Sparty. Dengan dalih pada tujuan pembangunan yang akan diperuntukkan bagi sipil dan penyediaan fasilitas terhadap kapal yang melintas, China menolak tuduhan atas tujuan pebangunan pulau buatan tersebut ialah diperuntukkan bagi kegiatan militerisasi.

Karena konflik yang telah melibatkan banyak negara sehingga berdampak pada munculnya beberapa insiden yang menurunkan kestabilan kawasan serta memicu bentrokan antara negara pengklaim kemudian menjadikan konflik kawasan ini sebagai perhatian dunia secara tidak langsung. Terlebih dengan fungsi besar dari kawasan Laut China Selatan yang tidak hanya dimanfaatkan oleh negara-negara sekitarnya saja, namun juga sebagian jalur dunia. Ketidakstabilan kawasan menjadi sesuatu yang penting sehingga sengketa ini kemudian menjadi terinternasionalisasikan dan mengundang perhatian berbagai pihak yang tidak terlibat sekalipun untuk setidaknya mengajukan usulan berupa penyelesaian konflik. Termasuk Amerika Serikat yang secara letak geografis pun telah ikut terlibat dalam penyelesaian konflik ini. Karena bagaimanapun, Laut China selatan merupakan kawasan yang telah menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan banyak pihak.

### **Kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa di Laut China Selatan**

Upaya penyelesaian sengketa di Laut China selatan telah menjadi isu yang terinternasionalisasikan secara tidak langsung dan menjadi perhatian banyak pihak. Munculnya banyak kepentingan dan beberapa insiden yang dirasa akan mengganggu kepentingan banyak pihak disana membuat harapan terselesaikannya persoalan ini semakin besar. Beberapa forum pertemuanpun dilakukan demi mendapatkan jalan penyelesaian antara

pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini juga turut dilakukan oleh Amerika Serikat dimana Washiton telah melibatkan dirinya dalam beberapa forum pertemuan yang membahas penyelesaian konflik ini. Adanya upaya penyelesaian melalui kebijakan berbagai forum maupun pihak tidak hanya dilakukan pada saat masa jabatan Obama saja, sebelumnya Bill Clinton serta George W. Bush juga sempat meakukan beberapa pertemuan bilateral dengan negara aliansi Amerika Serikat, yakni Filipina dan Vietnam.

Bill Clinton telah membangun kerjasama VFA (*Visiting Forces Agreement*) dengan merevitalisasi kesepakatan ini pada 1999 serta membawa kehadiran pasukan Amerika Serikat semakin dekat dengan kawasan sengketa. Hal ini juga dikarenakan kondisi pertahanan pasukan Manila termasuk dalam deretan penegakan militer yang rendah, sehingga dengan adanya VFA pasukan milik Filipina dapat teerbantuk dengan persenjataan dan pasukan Amerika Serikat yang lebih mumpuni. Melalui kerjasama ini pula, Amerika Serikat kemudian memiliki akses yang memungkinnya menelisik kawasan sengketa dalam jarak yang lebih dekat. Kepada Vietnam, Amerika Serikat yang telah 19 tahun memberikan embargo terhadap Vietnam akhirnya membuat kebijakan baru dengan mencabut sementara embargo tersebut. Hal ini dilakukan Amerika Serikat mengingat tingkat kemampuan pasukan milik Vietnam tidak jauh berbeda dengan pasukan Filipina. Pasukan Vietnam butuh persenjataan yang lebih memadai untuk mengamankan wilayahnya maupun kawasan yang diklaimnya.

Hubungan kerjasama ini terus berlanjut, pada masa kepemimpinan George. W. Bush, Amerika Serikat kembali membentuk kerjasama yang dinamai JUSMAG (Joint U.S. Military Advisory Group) yang berfungsi memberikan nasihat dan bantuan kepada AFP (Armed Forces of the Philippines) tentang pelatihan pertahanan dan militer kepada pasukan angkatan bersenjata milik Filipina. Kerjasama ini juga berupa bantuan logistik, dimana Amerika Serikat menyediakan peralatan militer, pasukan dan pemeliharaan kepada Filipina. Hal ini juga terkait penempatan pasukan Amerika Serikat yang akan mengisi pangkalan milik Filipina. Angkatan bersenjata Amerika Serikat juga akan memberikan pelatihan kepada AFP secara berkala. Sedang Vietnam dan Amerika Serikat menyepakati dibentuknya IMET (*International Military Education and Training*). Kerjasama ini dibuat untuk membuka pelatihan bahasa Inggris dari Amerika Serikat terhadap pasukan militer Vietnam pada tahun 2005, ITAR (*International Traffic in Arms Regulations*) mengenai lisensi perizinan untuk perdagangan barang dan jasa pada tahun 2007 (Manyin, 2012, p. 21), serta beberapa perjanjian kerjasama dalam hal pengembangan pasukan ditahun 2008.

Pada tahun 2010 Amerika Serikat dan Vietnam melaksanakan *Defense Policy Dialogue* yang membahas tentang politik, keamanan, dan masalah pertahanan setelah sebelumnya juga telah menandatangani kerjasama militer *Statement of Intent on Military Medical Cooperation* di Hanoi dibawah masa pemerintahan Barack Obama. Setelahnya pada 2006, Obama secara permanen menarik sanksi embargo terhadap Vietnam dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan kembali menjadi partner Vietnam dalam hal pemasok senjata. Bersama Filipina, Amerika Serikat menandatangani kesepakatan baru yaitu, EDCA (*Enhaced Defense Cooperation Agreement*) pada tahun 2014, penandatanganan perjanjian ini pula ditujukan untuk menekan China selaku negara pengklaim yang selalu bertindak agresif di kawasan sengketa. Selain tiu EDCA sendiri merupakan bentuk bantuan Amerika Serikat

dalam hal konstruksi fasilitas vital, peningkatan infrastruktur, penyiapan dan penyimpanan peralatan, serta pelatihan bersama yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi Filipina (Castro, 2016).

Selain kebijakan kerjasama dengan Filipina dan Vietnam dalam isu keamanan, Obama nyatanya juga melakukan kerjasama multilateral yang pada dua masa jabatan sebelumnya belum dilakukan sebagai bentuk kebijakan diplomasi politiknya. Dalam hal ini, Obama melakukan pendekatan kerjasamanya bersama dengan organisasi regional terdekat dengan kawasan sengketa, yakni ASEAN serta beberapa forum di dalamnya seperti, ARF (*ASEAN Regional Forum*), ASEAN Summit, bahkan Amerika Serikat dan ASEAN menyepakati dibentuknya ASEAN-US Summit. Dalam setiap kesempatan yang dihadiri oleh Amerika Serikat terkait pembahasan isu oleh forum-forum tersebut, perwakilan dari Amerika Serikat secara berkelanjutan akan memberikan statement yang cenderung diulang mengenai hak kebebasan navigasi, penghormatan terhadap hukum laut, serta isu keamanan kawasan yang dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan kegiatan di lapangan. Amerika Serikat juga secara konsisten memberikan dukungannya terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan damai dan mendorong penuh ASEAN sebagai wadah bagi mediasi diantara negara-negara sengketa, mengingat pula bahwa organisasi regional ini memiliki peran yang penting meliputi kawasan sekitarnya, serta adanya keterlibatan empat negara ASEAN di dalam sengketa.

## **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, upaya kerjasama yang dibangun oleh Obama dalam kebijakan terhadap sengketa Laut China Selatan ini nyatanya banyak mengadopsi kebijakan yang serupa dengan masa jabatan Clinton dan Bush. Namun begitu, kebijakan yang Obama lakukan terhadap Filipina dan Vietnam tidak menunjukkan adanya arah kemiripan secara keseluruhan ataupun adopsi kebijakan dari presiden sebelum dirinya, melainkan lebih condong pada Bill Clinton. Hal ini mengingat bahwa keduanya memiliki latar belakang partai politik yang sama, sehingga memiliki arah kebijakan yang serupa. Obama lebih cenderung memilih pola *soft diplomacy* dalam menjalankan kebijakannya. Melalui diplomasi keamanan yang Obama jalin bersama Filipina dan Vietnam mampu membuktikan bahwa yang dilakukan Obama merupakan bentuk kebijakan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang melalui bantuan pelatihan pasukan maupun bantuan persenjataan, serta pendanaan.

Melalui diplomasi politiknya bersama ASEAN dan forum-forum di dalamnya, opini Amerika Serikat yang berulang tentang dampak sengketa Laut China Selatan pun secara tidak langsung dapat membangun perspektif publik terhadap permasalahan ini. Dimana Amerika Serikat selalu mengaitkan permasalahan kawasan dengan kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan, sehingga mampu menggiring asumsi yang sama perihal dampak konflik yang belum selesai ini terhadap keberlangsungan isu yang dimaksud. Seperti yang selalu terselip dalam setiap pidato presiden Obama saat menghadiri forum multilateralnya. Presiden Obama kerap kali menyebutkan bahwa keteguhan Amerika Serikat untuk terus terbang dan berlayar di area sengketa demi mempertahankan hak navigasi setiap negara, serta tidak adanya hambatan terhadap perdagangan dunia. Selain itu Obama juga seringkali

menyebutkan desakannya terhadap penyelesaian konflik sengketa dengan mengutamakan jalan perdamaian, yaitu perundingan kerjasama.

Namun, terlepas dari kebijakan-kebijakan upaya yang telah dilakukan berbagai pihak termasuk Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan, sengketa ini masih terus berlanjut bahkan digadang-gadang telah memasuki perahilan chapter baru dengan latar konflik yang belum akan selesai.

## Daftar Pustaka

- Oil Giants to Tap Ocean Resources*. (2003, November 13). Retrieved from Xinhua Economic News Service.
- Castro, D. R. (2016, December 21). *East West Center; Asia Pasific Bulletin*. Retrieved August 21, 2018, from Bilateral and Regional Implications of the U.S.-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement: [EastWestCenter.org/APB](http://EastWestCenter.org/APB)
- EIA, U. S. (2013, April 4). *TODAY IN ENERGY: The South China Sea is an important world energy trade route*. Retrieved August 1, 2018, from U.S Energy Information Administration: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10671>
- EIA, U.S. (2013, February 7). *SOUTH CHINA SEA*. Retrieved August 7, 2018, from U.S Energy Information Administration: [https://www.eia.gov/beta/international/analysis\\_includes/regions\\_of\\_interest/South\\_China\\_Sea/south\\_china\\_sea.pdf](https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf)
- EIA, US. (2003, September 22). “*South China Sea Region,*” *Country Analysis Briefs*. Retrieved June 28, 2018, from U.S. Department of Energy: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10671>
- Hargreaves, S. (2012, April 24). *Tensions heat up over oil, gas in South China Sea*. Retrieved September 16, 2017, from CNN Money International: <http://money.cnn.com>
- Manyin, M. E. (2012). U.S.-Vietnam Relations in 2011: Current Issues and Implications for U.S. Policy. *Congressional Research Service*.
- Mark J. Valencia, J. M. (1997). *Sharing the Resources of the South China Sea*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Report, N. D. (1994). *The Military Posture of the Rim of the Republic of China on Taiwan in National Defense Report, Republic of China 1993-1994*. Taipei: Li Ming Cultural Enterprise Co.
- Rowan, J. P. (2005). Asian Survey, Vol. 45, No. 3. *The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute*.
- Roy, S. (1995). *Diplomasi dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UN, N. I.-D. (1992, February 25). *Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*. Retrieved June 28, 2018, from [http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN\\_1992\\_Law.pdf](http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_Law.pdf).
- Valencia, M. J. (1995). *China and the South China Sea Dispute, Adelphi Paper no. 298*. London: Oxford University Press.